

Bupati Balangan Lakukan MoU untuk Pelaksanaan Inovasi Daerah di Balangan



Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Ruskariadi, menandatangani komitmen bersama dengan SKPD dan BLUD untuk pelaksanaan inovasi daerah Kabupaten Balangan di Grandhika Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2020).

Kepala SKPD dan BLUD Kabupaten Balangan melakukan penandatanganan komitmen dengan Bupati Balangan dan Kementerian, terhadap pelaksanaan inovasi daerah di Kabupaten Balangan, Kalsel, Rabu (11/3/2020).

Secara simbolis, penandatanganan dilakukan oleh Sekda Kabupaten Balangan, Ruskariadi, mewakili Bupati Balangan.

Sementara dari Kementerian, yakni Kepala Bidang Pengembangan Inovasi Daerah, Badan Litbang Kemendagri, Janggi Tambunan yang juga menjadi narasumber pada acara.

MoU kali ini sekaligus dikemas dalam kegiatan Workshop Indeks Inovasi Daerah-Regulasi dan Arah Kebijakan Pelaksanaan Inovasi Daerah Tahun 2020.

Digelar Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Balangan, di Jakarta 10-13 Maret 2020.

Kepala Balitbangda Balangan, Aidinor, menerangkan, pihaknya berperan dalam pengembangan inovasi daerah.

Sementara kegiatan workshop tersebut merupakan tindaklanjut sekaligus upaya untuk pengembangan tersebut.

(Diringkaskas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/03/12/bupati-balangan-lakukan-mou-untuk-pelaksanaan-inovasi-daerah-di-balangan?page=2>.)

Workshop tersebut diikuti oleh ASN lingkup Pemkab Balangan meliputi pejabat tinggi pratama sebanyak 32 orang dan pejabat staf sebanyak 28 orang Balangan .

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Balangan, Aidinnor, menyampaikan perlu adanya kreativitas dan kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif.

Sehingga inovasi di daerah akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi objek pelanggaran hukum. Selain itu dapat mewujudkan sinergi dari berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat.

“Maka perlu upaya penguatan dan komitmen perangkat daerah agar memiliki satu persepsi dan dukungan yang sama dalam pelaksanaan inovasi daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang inovatif,” jelasnya.

Dikatakan, bahwa dukungan dan komitmen tersebut akan dituangkan dalam bentuk Penandatanganan Dokumen Komitmen dari seluruh Kepala SKPD dan BLUD dengan Bupati Balangan dan disaksikan oleh Kementerian Dalam Negeri RI.

Diharapkan pengelolaan dan pengembangan inovasi daerah melalui peranan seluruh SKPD dan BLUD dapat terlaksana dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta mengedepankan asas keadilan, kepatutan dan memberi manfaat sebesar-besarnya untuk Masyarakat.

“Dan Balitbangda sesuai dengan jadwal tim percepatan pengelolaan dan penyusunan indeks inovasi daerah akan dimulai pada bulan April 2020,” tuturnya.

Data indeks inovasi yang sudah terjaring akan dilakukan verifikasi kelengkapan data dukung dari indikator-indikator inovasi dan selanjutnya akan dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri melalui Bidang Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri RI.

Sambutan Bupati Balangan H Ansharuddin yang dibacakan Sekda Ir Ruskariadi menyampaikan bahwa Pemkab Balangan selalu mendukung ide inovasi dari instansi pemerintahan salah satunya yang dilakukan oleh instansi Balitbangda.

“Sesuai komitmen yang ditanda tangani dengan kemendagri ini, setiap unit kerja harus memiliki inovasi setiap tahunnya, ini menjadi kewajiban bagi setiap unit kerja pemerintahan dan ini berdampak baik untuk percepatan roda pemerintahan kita,” ucapnya.

Bupati juga mengingatkan bahas saat ini pemerintah pusat memberikan tambah dana kepada daerah, yang dinilai dari prestasi daerah tersebut. Ini lah yang jadi motivasi Balangan untuk lebih berinovasi agar prestasi yang sudah didapat bisa dipertahankan dan prestasi baru bisa diraih.

“Sebagai contoh, prestasi kita mendapatkan WTP berturut turut, dana kita ditambah oleh pusat, apa lagi kita mendapat prestasi baru, maka dana daerah kita bisa lebih besar, untuk itu saya harapkan terus berinobasi demi kelancaran roda pemerintahan kita,” pungkasnya.

Diringkas dari <https://klikkalsel.com/genjot-inovasi-daerah-pemkab-balangan-gelar-mou-bersama-kemendagri/>.)

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Bupati Balangan Lakukan MoU untuk Pelaksanaan Inovasi Daerah di Balangan*, 12 Maret 2020
2. <https://klikkalsel.com>, *Genjot Inovasi Daerah, Pemkab Balangan Gelar MoU Bersama Kemendagri*, 11 Maret 2020

Catatan berita:

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima)

tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.

Program Pembangunan Nasional

- Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.
- Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini.
- RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
- RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.
- Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional.
- Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Rincian Program Pembangunan

Kondisi Umum

- Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi

karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.

- Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004, kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar.

Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembanguna Jangka Panjang Tahun 2005-2025

- Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
- Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.
- Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.

- Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.
- Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
- Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.
- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
- Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah dilakukan melalui penumbuhan klaster-klaster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi klaster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pematapan iklim bisnis yang kondusif. Selain itu akan dikembangkan pula wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembaga lembaga pendukung ekonomi berbasis maritim seperti asuransi, perbankan, teknologi, industri perkapalan, pendidikan/training kemaritiman, serta kerjasama antar negara.
- Kepariwisataaan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.